

## MISI GLOBAL TNI

Oleh Herry Darwanto

Para Pendiri (*Founding Fathers*) Negara kita telah dengan bijaksana mencantumkan kewajiban Negara RI untuk ikut serta menjaga ketertiban dunia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dunia memang tidak pernah bebas dari ketidaktertiban, walaupun Perang Dingin antara Blok Komunis dan Blok Kapitalis, yang dikhawatirkan akan memicu peperangan antarnegara, telah usai pada akhir tahun 1980an. Kini ketidaktertiban dunia masih tetap ada, namun lebih disebabkan oleh gerakan separatisme, radikalisme, dan perang saudara dalam suatu negara. Kerusuhan yang terjadi di berbagai belahan dunia ini menyebabkan PBB menjalankan operasi pemeliharaan perdamaian (*Peacekeeping Operations* – PKO) sejak awal dibentuknya lembaga ini. Sejak 1948, PBB telah selesai menjalankan 55 misi perdamaian dunia, dan saat ini ada 16 misi perdamaian yang tengah digelar, sebagian besar di Afrika. Lihat Tabel 1. Ada 90 ribu personel tentara dan 33 ribu tenaga sipil (termasuk polisi) yang dikerahkan untuk menegakkan perdamaian. Misi PBB ini sejalan dengan amanat UUD 1945, bahwa dunia harus bebas dari peperangan agar terwujud “ ..., perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tabel 1. Misi Perdamaian PBB (2014)

NO	NAMA MISI	DIBENTUK	NEGARA/WILAYAH	TENTARA	SIPIL	JUMLAH
1	UNTSO	1948	Timur Tengah	0	376	376
2	UNMOGIP	1949	Kashmir	0	112	112
3	UNFICYP	1964	Siprus	858	214	1.072
4	UNDOF	1974	Israel/Palestina	930	160	1.090
5	UNIFIL	1978	Lebanon	10.238	885	11.123
6	MINURSO	1991	Sahara Barat	26	463	489
7	UNMIK	1999	Kosovo	0	366	366
8	UNMIL	2003	Liberia	4.308	2.977	7.285
9	MINUSTAH	2004	Haiti	4.957	3.898	8.855
10	UNOCI	2004	Pantai Gading	6.086	2.735	8.821
11	UNAMID	2007	Sudan	12.614	7.446	20.060
12	MONUSCO	2010	Kongo	19.463	5.709	25.172
13	UNISFA	2011	Sudan	3.946	334	4.280
14	UNMISS	2011	Sudan Selatan	10.251	3.799	14.050
15	MINUSMA	2013	Mali	8.461	2.134	10.595
16	MINUSCA	2014	Afrika Tengah	7.469	1.514	8.983
	Jumlah			89.607	33.122	122.729

Sumber: <http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/bnote1214.pdf>

## Peran TNI

TNI telah sejak tahun 1957 ikut serta terlibat aktif dalam misi-misi perdamaian PBB (disebut sebagai Kontingen Garuda) sebagai upaya melaksanakan misi global sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Kontingen Garuda telah meninggalkan jejak kaki perdamaian di berbagai negara seperti Kongo (1961-1963), Vietnam (1973-1975), Irak (1989), Namibia (1989), Kuwait (1992), Kamboja (1993), Somalia (1993), Bosnia (1993-1996), Macedonia (1997), Slovenia (1997), Kroasia (1995), Reblaka (1997), Mozambik (1994), Filipina (1999), Tajikistan (1998), Sierra Leone (1999), Nepal (2007), Darfur (2007). Saat ini, jumlah prajurit TNI yang menjalankan misi perdamaian PBB adalah sekitar 1.800 personel, terbagi dalam enam misi perdamaian PBB, yaitu Haiti, Kongo, Sudan, Lebanon, Liberia, dan Sudan Selatan. Secara keseluruhan Indonesia telah menyumbangkan sekitar puluhan ribu personel dalam 15 misi perdamaian PBB.

Di beberapa misi perdamaian, Kontingen Garuda menunjukkan prestasi yang membanggakan. Mayjen. Imam Edy Mulyono ditunjuk oleh Sekjen PBB sebagai *Head of Mission/Force Commander* dalam misi perdamaian MINURSO di Sahara Barat pada Agustus 2013. Posisi *Force Commander* merupakan jabatan strategis setingkat *Assistant Secretary General*. Berbagai prestasi lain juga ditunjukkan oleh Kontingen Garuda pada misi-misi yang lain, seperti Kontingen Garuda XXVIII-F/UNIFIL di Lebanon yang tahun lalu menerima Medali PBB sebagai penghargaan atas kemampuan menjalankan tugas secara profesional. Jumlah personel Kontingen Garuda Indonesia di UNIFIL adalah yang terbesar diantara kontingen-kontingen negara lain.

## Kebijakan Pelaksanaan

Pada tahun 2007 TNI membentuk Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP), lembaga yang khusus didirikan untuk menyiapkan calon Pasukan Perdamaian Indonesia atau Kontingen Garuda. PMPP yang kini berada di Kawasan *Indonesia Peace and Security Centre* (IPSC) Sentul, Bogor, merupakan wadah untuk menyiapkan prajurit TNI agar dapat menjalankan misi perdamaian di negara lain yang berbeda bahasa, budaya, dan lingkungan; serta untuk dapat mengalahkan lawan yang mempunyai doktrin, strategi, taktik, dan kekuatan tersendiri. Fungsi PMPP TNI adalah: 1). Menyusun, merencanakan, menyiapkan dan mengevaluasi pengimplementasian dan pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian; 2). Melaksanakan kegiatan latihan dan memelihara kemampuan personel TNI yang akan melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian; dan 3). merencanakan dan menyusun rencana kebutuhan operasi, administrasi dan logistik untuk satuan yang akan diberangkatkan dalam misi pemeliharaan perdamaian.

Disamping PMPP, juga telah dibentuk Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) dengan Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2011 yang keanggotaannya terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Pengarah), Menteri Luar Negeri (Ketua), Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Intelijen Negara. TKMPP mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas itu, TKMPP melaksanakan fungsi: a). pengoordinasian perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penghentian partisipasi Indonesia pada misi-misi

pemeliharaan dunia; b). penyiapan kajian komprehensif dan penyiapan rekomendasi tentang kebijakan bagi partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan dunia; c). penyiapan dan perumusan posisi dan strategi Indonesia dalam perundingan mengenai partisipasi Indonesia; d). pemantauan dan evaluasi partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia.

### **Tujuan Lain Misi Perdamaian**

Keikut-sertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB adalah mandat konstitusi negara, yang perlu direncanakan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh TNI sebagai kewajiban negara dalam mewujudkan dunia yang lebih damai. Namun mengirim tentara Indonesia dalam misi-misi perdamaian PBB juga dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan lain.

Pertama, tentara Indonesia akan lebih meningkat kapabilitasnya setelah terjun langsung di medan pertempuran yang sebenarnya. Kapabilitas yang dibangun dari pengalaman menjalankan operasi perdamaian di negara lain itu akan sangat berguna dalam menghadapi masalah keamanan yang serupa jika suatu saat terjadi di negeri sendiri.

Kedua, Kontingen Garuda dapat mempromosikan alutsista produksi dalam negeri dengan menggunakannya dalam misi-misi perdamaian di berbagai negara, seperti yang dilakukan Kontingen Garuda di Lebanon yang membawa panser Anoa produksi PT. Pindad. Kehandalan alutsista buatan Indonesia yang digunakan dalam misi-misi perdamaian PBB merupakan promosi yang efektif untuk pemasarannya. Seperti diketahui, industri pertahanan Indonesia telah mampu memproduksi berbagai alutsista sampai tingkat kecanggihan tertentu, namun memproduksinya dalam kuantitas besar agar biaya produksi dapat ditekan masih menghadapi beberapa kendala antara lain pemasaran.

### **Tantangan Ke Depan**

TNI telah terbukti tidak pernah absen dalam ikut serta menjalankan misi perdamaian PBB. Namun kontribusi Indonesia masih dapat ditingkatkan lebih besar lagi. Dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah personel yang disumbangkan Indonesia untuk misi perdamaian PBB relatif kecil. Dengan jumlah personel yang dikirim sebanyak 1.843 orang (2014), Indonesia menempati urutan ke 17 dari seluruh negara pengirim tentara untuk misi perdamaian PBB. Urutan teratas negara-negara penyumbang personel dalam misi perdamaian PBB tahun 2014 adalah Bangladesh, selanjutnya adalah India, Pakistan, Ethiopia, Rwanda, dll. Lihat Tabel 2.

Tabel 2. Sepuluh Negara Terbanyak Mengirim Misi Perdamaian (2014)

PERINGKAT	NEGARA	JUMLAH PERSONEL (orang)
1	Bangladesh	9.275
2	India	8.141
3	Pakistan	7.926
4	Ethiopia	7.810
5	Rwanda	5.684
6	Nepal	5.209
7	Ghana	2.993
8	Nigeria	2.948
9	Ghana	2.907
10	Senegal	2.823

Sumber: [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_countries\\_by\\_number\\_of\\_UN\\_peacekeepers](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_UN_peacekeepers) diunduh 15/01/2015

Indonesia jelas mempunyai prajurit lebih banyak daripada negara-negara yang disebut di atas. Menjadi suatu tantangan bagi TNI adalah: Siakah mengirim prajurit lebih banyak lagi dalam misi-misi perdamaian PBB? Mantan Presiden SBY beberapa tahun yang lalu mencanangkan gagasan untuk menjadikan Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara penyumbang personel untuk misi perdamaian PBB, dengan setiap tahun minimal ada 4.000 personel yang dapat dikirim. Jumlah ini berarti sekitar dua kali lipat dari personel yang dapat dikirim saat ini. Kiranya gagasan ini perlu dan dapat direalisasikan, namun tentu saja memerlukan persiapan yang cukup seksama, meliputi sosialisasi, penyeleksian, penyiapan pelatih/instruktur, pelatihan/penggemblengan, mobilisasi, penyiapan logistik, pengurusan administrasi, dsb.

Tantangan kedua adalah: Siakah TNI menerima mandat PBB untuk menempatkan perwira-perwiranya pada posisi-posisi yang lebih strategis dalam misi-misi perdamaian PBB? Dibandingkan negara-negara lain, tidak banyak perwira Indonesia yang menjadi pemimpin/komandan dalam misi-misi perdamaian. Indonesia pernah diberi kesempatan untuk menambah satu batalyon mekanis dalam misi perdamaian di Bosnia dan menempatkan seorang Jenderal bintang dua untuk menjadi komandan pasukan, namun ternyata tawaran itu tidak dapat dipenuhi. Berbagai kendala terhadap tantangan ini harus diatasi dengan perencanaan dan pembinaan para prajurit eks peserta misi perdamaian. Para prajurit yang menunjukkan prestasi diatas rata-rata setelah selesai menjalankan suatu misi perdamaian perlu mendapat tugas yang lebih besar dalam misi-misi perdamaian selanjutnya dengan sasaran dapat menempati posisi yang lebih tinggi, tidak hanya dalam operasi di lapangan tetapi juga di markas PBB, khususnya di Departemen Pemeliharaan Perdamaian PBB.

Tantangan berikutnya adalah: Siakah TNI mengirimkan tidak hanya prajurit-prajurit yang handal tetapi juga polisi dan profesional sipil lain dalam suatu tim terpadu sesuai dengan tuntutan terhadap misi perdamaian PBB yang lebih multi dimensi? Termasuk dalam kelompok profesional sipil ini adalah tenaga medis, psikolog, guru, ulama/ahli agama, ahli bangunan, ahli listrik, ahli hukum, ahli IT, konsultan UKM, dsb. Mereka ini mungkin dibutuhkan untuk menaklukkan perasaan dan pikiran para pelaku kerusakan yang mempunyai motif, latar belakang dan permasalahan yang berbeda-beda. Tim terpadu ini, dengan

TNI sebagai kekuatan intinya, diharapkan siap menangani konflik yang terjadi di berbagai negara sesuai mandat yang diberikan PBB. Tentu saja, komposisi tim yang dikirim akan harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi.

## **Penutup**

Indonesia adalah negara terbesar keempat dari segi jumlah penduduk dan anggota G20 yaitu kelompok negara-negara terkaya di dunia. Indonesia juga diproyeksikan akan menjadi negara 10 terkaya di dunia dalam beberapa dasawarsa mendatang. Dalam hubungannya dengan negara-negara lain, Indonesia adalah negara Non-blok, yang dapat bekerjasama dengan Blok China/Rusia atau Blok Amerika/Eropa. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, sehingga mudah menjalin kerjasama dengan negara-negara Islam. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia dapat diterima dengan baik sebagai sahabat oleh negara-negara lain. Indonesia dengan demikian mempunyai posisi yang unik, yang dapat dikapitalisasi untuk menegakkan perdamaian di berbagai negara yang mengalami konflik. Mewakili bangsa dan negara Indonesia, TNI diharapkan siap mengemban misi perdamaian dunia dalam skala yang semakin besar.

--oOo--

*Penulis adalah PNS senior Kementerian Pertahanan. Pendapat pribadi.*